

Analisis Tata Kelola Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabkma Membramo Tengah

Sarmaida¹, Manuel A. Todingbua², Yunus Sirante³

Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km.13, Daya, Kec. Tamalanrea, Kota

Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Abstrak: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, sebagai unsur pelayan yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik atau pelayanan masyarakat dalam bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan tidak terlepas dari administrasi dan keuangan dalam melangsungkan program kependudukan secara terbuka bagi masyarakat. Salah satu fungsi keuangan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada pelaksanaannya harus memperhatikan tata kelola keuangan baik dalam pengelolaan, pelaksanaan, realisasi dan pelaporannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelola Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah. Obyek penelitian ini di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap informan dan dokumentasi. Metode analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, mulai dari Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tata Kelola Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, dilakukan sesuai prosedural yang berlaku, yang mengacu pada perda Bupati Membramo Tengah; Hambatan Tata Kelola Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, diantaranya terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi khusus keuangan dan auditor serta akuntan; dan Kinerja Keuangan dilingkup Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya sumber daya manusianya.

Kata-kata Kunci: Tata Kelola, Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan.

TITLE REPRESENTS CONTENTS TEXT, BRIEF, WRITTEN NOT SPECIFIC, AND NOT MORE THAN FOURTEEN WORDS

Abstract: Population and Civil Registration Service of Kabakma Membramo Tengah, as a service element that carries out public service duties and functions or community services in the field of Population and Civil Registration. In carrying out service duties and functions, it cannot be separated from administration and finance in carrying out population programs openly for the community. One of the financial functions of the Population and Civil Registration Service in its implementation must pay attention to financial governance both in management, implementation, realization and reporting. This study aims to determine and analyze the Financial Reporting Governance on Financial Performance at the Population and Civil Registration Service of Kabakma Membramo Tengah. The object of this research is at the Population and Civil Registration Service of Kabakma Membramo Tengah. This research is a qualitative research. The source of research data from primary data and secondary data. Data collection methods through observation, interviews using questionnaires with informants and documentation. The analysis method uses qualitative descriptive analysis, starting from Data

Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. The results of the study indicate that: Financial Reporting Management at the Population and Civil Registration Service of the Central Membramo Regency Headquarters is carried out in accordance with applicable procedures, which refer to the regional regulation of the Central Membramo Regency Headquarters; Obstacles to Financial Reporting Management at the Population and Civil Registration Service of the Central Membramo Regency Headquarters include limited human resources who have specializations in finance and auditors and accountants; and Financial Performance within the Population and Civil Registration Service of the Central Membramo Regency Headquarters still needs to be improved, especially its human resources.

Keywords: *Governance, Financial Reporting and Financial Performance.*

PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, sebagai unsur pelayan yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik atau pelayanan masyarakat dalam bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan tidak terlepas dari administrasi dan keuangan dalam melaksanakan program kependudukan secara terbuka bagi masyarakat. Salah satu fungsi keuangan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada pelaksanaannya harus memperhatikan tata kelola keuangan baik dalam pengelolaan, pelaksanaan, realisasi dan pelaporannya. Pada penelitian ini peneliti fokus pada Tata Kelola Pelaporan Keuangan untuk mengetahui sejauh mana tata kelola keuangan itu dapat berdampak pada kinerja keuangan, ini berarti bahwa tata kelola keuangan melibatkan pelaporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan realisasi anggaran yang ada pada progres kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, yang telah selesai. Terkait tentang hal ini secara umum bahwa Pengelolaan sistem Kependudukan Dan Catatan Sipil yang baik, yakni wujud kesuksesan untuk melaksanakan tugas bidang pelayanan publik berdasar pada maksud yang sudah terencanakan. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah berperan sebagai pihak yang mengelola dana publik untuk bisa memfasilitasi informasi finansial yang dibutuhkan secara tepat, sesuai, dan terpercaya, maka diharuskan agar mempunyai sistem informasi yang kredibel. Maka peran Laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab terhadap kepengurusan sumber daya ekonomi di suatu unsur, seperti informasi keuangan. Informasi yang sepatutnya tersaji berbentuk laporan keuangan daerah sepatutnya berdasar pada kebutuhan stakeholder (Defitri, 2014). Atas dasar itulah, perlu memahami anggaran dana supaya tidak mengalami kesalahan informasi selama mengelola keuangan daerah (Defitri, Yulistia, Apriyeni, & Eliza, 2016).

Seluruh aktivitas dalam mengelola keuangan haruslah menerapkan tata kelola keuangan daerah, dimana pemerintah daerah menentukan target, lalu merancang rencana aktivitas demi memperoleh tujuan itu. Tata

kelola keuangan daerah perlu didukung oleh penelaahan sistem akuntansi keuangan daerah supaya dalam menatausahakan keuangan daerah berakurasi dan memiliki pertanggungjawaban tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang layak mampu membantu dalam menentukan/verifikasi transaksi supaya bisa menelusuri dana berdasar pada tujuan, termasuk pengecekan otoritas, efisiensi, kesahan pembelajaan dana. Tata keuangan daerah pada penerapannya pasti belum mampu diklasifikasikan sempurna, masih ada hambatan yang perlu mendapat perbaikan, terkhusus permasalahan akuntansi pada kondisi tertentu bisa berperan sebagai hambatan teknis bagi eksekutif selama mengelola keuangan daerah, misal penerapan SAP berbasis akrual yang menjadi kewenangan akuntansi yang harus diimplementasikan ke tata kelola keuangan negara sekarang ini.

Observasi awal yang dilakukan peneliti pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, terkait fokus penelitian tentang tata kelola pelaporan keuangan, peneliti memperoleh informasi bahwa terdapat isu seputar transparansi dan akuntabilitas yang tidak terlepas dari maraknya penyalahgunaan wewenang oknum pegawai dalam kepengurusan bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil, maka untuk mengetahui secara pasti isu tentang hal ini maka peneliti melakukan kajian pada sistem tata kelola pelaporan keuangan sehingga diharapkan nantinya dapat diketahui dengan jelas jika terdapat atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya.

Sesuai uraian diatas maka peneliti menghubungkan capaian kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, yakni salah satunya adalah terwujudnya pelaksanaan tugas pelayanan yang adil, jujur dan bebas korupsi dengan melakukan evaluasi pada kinerja keuangan, selanjutnya menghubungkan dengan sistem tata kelola pelaporan keuangan.

Selanjutnya peneliti menyusun perencanaan penelitian dengan menetapkan judul penelitian "Analisis Tata Kelola Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah"

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelola Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah; Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan Tata Kelola Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah; dan Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan dilingkup Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan upaya penggunaan serta pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga dimana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan (pemerintah/swasta) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Menurut Agus Harjito dan Martono (2012:4) manajemen keuangan (Financial Management), atau dalam literatur lain disebut perbelanjaan, adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelolah aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang artinya manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset untuk mencapai tujuan institusi baik institusi pemerintah maupun institusi swasta.

Pengelolaan pemerintah yang baik, yaitu wujud kesuksesan untuk melaksanakan tugas guna pembangunan negara berdasar pada maksud yang sudah terencana. Perihal ini bisa diperlihatkan oleh peningkatan perhatian masyarakat kepada pelaksanaan pemerintah, terkhusus terkait penyelenggaraan ekonomi negara. Pemerintah daerah berperan sebagai pihak yang mengelola dana publik untuk bisa memfasilitasi informasi finansial yang dibutuhkan secara tepat, sesuai, dan terpercaya, maka diharuskan agar mempunyai sistem informasi yang kredibel.

Tujuan umum laporan keuangan menurut PSAK No 1 (IAI, 2009) adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada

mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan, khususnya dalam hal waktu penyajiannya, kewajiban dan kepastian diperolehnya kas atau setara kas. Menurut Sjahrial dan Purba (2013:9) "Laporan Keuangan (Financial Statement) dapat mengungkapkan dan menginformasikan empat aktivitas perusahaan (business) perencanaan, pendanaan, investasi dan operasi. Masing-masing aktivitas utama perusahaan ini sangat penting untuk dipahami sebelum kita dapat menganalisa laporan keuangan perusahaan secara efektif". Sedangkan menurut Fahmi (2011:28) dalam buku "Analisis Laporan Keuangan" menyatakan bahwa : "Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan". Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan- penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.

Pengelolaan keuangan daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah ialah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sutrisno (2009) dalam Hutabarat (2020) kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja Keuangan adalah kinerja manajemen, yang merupakan perluasan nilai keuangan dan diperkirakan manfaatnya. Konsekuensi dari memperkirakan penanda keuangan sangat penting sehingga mitra dapat memahami status fungsional perusahaan dan tingkat pencapaian perusahaan. Hery (2016:13) kinerja keuangan

merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu, mengukur kondisi keuangan perusahaan melalui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Pang et al., 2020).

Kinerja keuangan yang stabil merupakan daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modalnya, sehingga menjaga kestabilan kinerja keuangan menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai, dimana kinerja keuangan dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelolah Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah. Obyek penelitian ini di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap informan dan dokumentasi. Metode analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, mulai dari Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tata Kelolah Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap informan penelitian, maka dapat dideskripsikan tentang Analisis Tata Kelolah Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

4.1 Hasil Observasi dan Wawancara

Observasi sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi melalui pengamatan untuk melihat secara langsung obyek penelitian dan mengamati bagaimana Analisis Tata Kelolah Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah. Wawancara merupakan teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer. Hasil wawancara penelitian ini diperoleh data bahwa Analisis Tata Kelolah Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo

Tengah sebagai berikut:

Wawancara terhadap Informan pada penelitian ini, mengatakan bahwa:

“Tata Kelolah Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, dilakukan sesuai prosedural yang berlaku, yang mengacu pada perda Bupati Membramo Tengah.”

Wawancara dilakukan terhadap Informan pada penelitian ini, mengatakan bahwa: “Hambatan Tata Kelolah Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, diantaranya terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi khusus keuangan dan auditor serta akuntan”

Wawancara dilakukan terhadap Informan pada penelitian ini, mengatakan bahwa: “Kinerja Keuangan dilingkup Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya sumber daya manusianya”

Hasil wawancara terhadap informan pada penelitian ini didapatkan informasi bahwa Tata Kelolah Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, dilakukan sesuai prosedural yang berlaku, yang mengacu pada perda Bupati Membramo Tengah. Hambatan Tata Kelolah Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, diantaranya terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi khusus keuangan dan auditor serta akuntan. Kinerja Keuangan dilingkup Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya sumber daya manusianya.

4.2 Pembahasan Analisis Tata Kelola Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah

Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan upaya penggunaan serta pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga dimana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya. Pentingnya manajemen keuangan terlihat jelas ketika kita menghadapi krisis keuangan atau ketika kita berusaha mencapai tujuan finansial yang ambisius. Tanpa dasar yang kuat dalam manajemen keuangan, bahkan kapal terbesar sekalipun bisa tenggelam dalam badai ekonomi. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan bukan hanya pilihan, melainkan keharusan bagi siapa pun yang ingin berlayar

lancar menuju masa depan finansial yang aman dan sejahtera.

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan (pemerintah/swasta) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah.

Menurut Agus Harjito dan Martono (2012:4) manajemen keuangan (Financial Management), atau dalam literatur lain disebut perbelanjaan, adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelolah asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang artinya manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset untuk mencapai tujuan institusi baik institusi pemerintah maupun institusi swasta. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan (pemegang saham).

Kinerja keuangan adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Melalui kinerja keuangan, instansi pemerintah/perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi dan efektifitas dari aktivitas perusahaan pada periode waktu tertentu. Kinerja keuangan juga berguna sebagai salah satu pertimbangan investor atau pihak eksternal dalam menanamkan modalnya di instansi pemerintah/perusahaan swasta nasional. Kurniasari (2014:12), kinerja keuangan adalah prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dan tertuang pada laporan keuangan dari perusahaan.

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan alat analisis. Sedangkan menurut IAI (2015:69) kinerja keuangan yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Pengukuran kinerja keuangan dilihat dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan, informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan serta kinerja di masa depan melalui perhitungan rasio keuangan yang menghubungkan data keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Nilai rasio keuangan tersebut yang nantinya dibandingkan dengan tolok ukur yang telah ada.

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam membahas tentang Analisis Tata Kelola Pelaporan Keuangan Pada Kinerja Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, diketahui bahwa :

1. Tata Kelola Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, dilakukan sesuai prosedural yang berlaku, yang mengacu pada perda Bupati Membramo Tengah
2. Hambatan Tata Kelola Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, diantaranya terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi khusus keuangan dan auditor serta akuntan
3. Kinerja Keuangan dilingkup Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya sumber daya manusianya.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, dalam menjalankan salah satu fungsinya telah melaksanakan prosedural pekerjaan terkait Tata Kelola Pelaporan Keuangan, selain itu penatakelolaan keuangan masih membutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi khusus dibidang keuangan.

Penelitian terkait Tata Kelola Pelaporan Keuangan terhadap kinerja keuangan telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, adapun penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Maria Cyntia Archilues dan Nina Febriana Dosinta (2023) meneliti tentang Kinerja Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, dan Kesehatan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Volume 4, Nomor 3, Oktober 2023 E-ISSN: 2745- 5343/P-ISSN:2721-060. Hasil uji Nagelkerke R Square yang digunakan untuk mengevaluasi koefisien determinasi menunjukkan sebesar 0,602, atau menerangkan bahwa variabel independen mempunyai kemampuan 60,2% dalam menjelaskan variasi dalam kesehatan keuangan. Penelitian ini berimplikasi bahwa leverage, likuiditas, ROA, dan NPL, sebagai sinyal yang baik terhadap kesehatan keuangan. Penelitian ini juga berimplikasi bahwa pentingnya mempertahankan proporsi dewan komisaris sebagai agent dalam pertanggungjawaban kepada principal khususnya pengawasan kesehatan keuangan perusahaan.

Secara umum diketahui bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja Keuangan adalah kinerja

manajemen, yang merupakan perluasan nilai keuangan dan diperkirakan manfaatnya. Konsekuensi dari memperkirakan penanda keuangan sangat penting sehingga mitra dapat memahami status fungsional perusahaan dan tingkat pencapaian perusahaan. Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nivi Chintia Walangitan, dkk (2020) melakukan penelitian tentang Tata Kelola Dan Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 219-225. Penelitian ini menunjukkan bahwa : Pelaksanaan transparansi di Kantor Kecamatan Wanea sudah baik, dimana terdapat pengumuman kebijakan APBD, penyediaan dokumen anggaran dan pendapatan yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, pengakomodasian suara/usulan masyarakat dan pemberian informasi kepada publik; Pelaksanaan akuntabilitas di Kantor Kecamatan Wanea sudah baik karena kemampuan menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, tepat, mampu memberikan pelayanan optimal bagi publik, mampu memberikan ruang bagi masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik, serta mampu menyediakan sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah; dan Kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Wanea sudah baik karena adanya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, pengawasan dan evaluasi kinerja, ukuran kinerja keuangan sebagai pedoman proses kegiatan instansi pemerintah, serta pengambilan keputusan secara objektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tata Kelolah Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, dilakukan sesuai prosedural yang berlaku, yang mengacu pada perda Bupati Membramo Tengah.
2. Hambatan Tata Kelolah Pelaporan Keuangan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma Membramo Tengah, diantaranya terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi khusus keuangan dan auditor serta akuntan.
3. Kinerja Keuangan dilingkup Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabakma

Membramo Tengah, masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya sumber daya manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Bandung.
- Alfabeta.Asnaini, M.A. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: Teras. 2012). Hal.1.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Halim, Alfian. 2016. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa)." Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Alauddin. Makasar.
- Hardani, dkk (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Harjito Agus dan Martono. 2012. *Manajemen Keuangan*. Edisi ke-2. Ekonisia, Yogyakarta.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: Grasindo.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2018). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Hutabarat, F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. In G. Puspita (Ed.), *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (pp. 1-24). Desantra Publisher.
- https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Kinerja_Keuangan/Perusahaan/Vz0fEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Rawamangun: Prenadamedia Group.

Maria Cyntia Archilues dan Nina Febriana Dosinta (2023) Kinerja Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, dan Kesehatan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Volume 4, Nomor3, Oktober2023E-ISSN:2745-5343/P-ISSN:2721-60X<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi>.

Muindro Renyowijoyo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media Pang, J. et al., 2020, Potential rapid diagnostics, vaccine and therapeutics for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV): A systematic review, Journal of Clinical Medicine, 9(3) : 2-33.

Nivi Chintia Walangitan, dkk (2020) Tata Kelola Dan Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 219-225.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Riduwan. 2012. Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung:Alfabeta

Sanusi Anwar. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Semiawan, Conny R.. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta:Grasindo.Sudaryono. (2018). Metodologi Penelitian. Raja Grafindo.

Sudaryono. (2020). Metodologi Penelitian. Raja Grafindo.

Sunyoto, Danang. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota IKAPI.